

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

FARHAN DAMARA

NPP. 30.0799

Asdaf Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email: frhndmra@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Nur Ichsan Amin, SH., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement: *Stunting is a major problem for the quality of human resources and is also a threat to the nation's competitiveness in the future. Stunting is a problem that occurs in children under five due to lack of nutrition, causing growth disorders in the body and delays in the ability to think. Related to the problem of stunting, the Government of Sampang Regency made a policy to reduce stunting in Sampang Regency.*

Purpose: *This research examines the implementation of the existing stunting policy in Sampang Regency, to find out and analyze what are the supporting factors and inhibiting factors in the implementation of the Stunting Reduction Policy, to find out and analyze the efforts that have been made and will be carried out by the Sampang Regency government, especially the Health and Family Planning Office in the successful implementation of the Stunting Reduction Policy Regulations in Sampang Regency.* **Method:** *The method used in this research is descriptive qualitative method with an inductive approach. This study uses implementation theory from George C Edward III.* **Results:** *The results of the research on the implementation of the stunting policy in Sampang Regency which was carried out by the Health and Family Planning Office of Sampang Regency as the main executor, is that the implementation of the stunting.* **Conclusion:** *In its implementation there are still obstacles, namely there are still many early marriages and a lack of administrative compliance for immigrant communities.*

Keywords: *Stunting, Policy Implementation, Reducing Stunting, Sampang Regency*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: *Stunting* menjadi masalah utama terhadap kualitas sumber daya manusia dan juga menjadi ancaman untuk kemampuan daya saing bangsa dimasa yang akan datang. *Stunting* adalah masalah yang terjadi pada anak balita karena kurangnya gizi sehingga menimbulkan gangguan pertumbuhan pada tubuh dan keterlambatan kemampuan berpikir. Terkait dengan masalah *stunting*, Pemerintah Kabupaten Sampang membuat kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang. **Tujuan:** Penelitian ini mengkaji terkait dengan implementasi kebijakan *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang, untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting*, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan implementasi Peraturan Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C Edward III. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian dari implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang sebagai pelaksana utama adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan angka *stunting* di Kabupaten Sampang semakin tahun semakin menurun. **Kesimpulan:** Meskipun implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang sudah dilaksanakan dengan baik, namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu masih banyaknya pernikahan dini dan kurangnya taat administrasi bagi masyarakat pendatang.

Kata Kunci: *Stunting*, Implementasi Kebijakan, Penurunan *Stunting*, Kabupaten Sampang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi permasalahan *stunting* yang ada di Jawa Timur membuat Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024 sebagai tindaklanjut dari adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam

penyelenggaraan kebijakan terkait percepatan penurunan *stunting* tersebut.

Pemerintah Kabupaten Sampang sangat serius dalam menangani masalah *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting* yang menjadi bukti nyata Pemerintah Kabupaten Sampang dan sebagai dasar dalam menindaklanjuti masalah *stunting* di Kabupaten Sampang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang menyatakan bahwa jumlah warga miskin di wilayah Kabupaten Sampang masih menempati angka tertinggi di Jawa Timur. Angka kemiskinan di Sampang pada 2017 lalu sebanyak 23,56 % atau 225,13 ribu jiwa, sedangkan tahun 2018 turun 21,21 % atau 204, 60 ribu jiwa penduduk miskin. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami peningkatan 4,30 persen dari 22,78 persen pada Maret 2020 menjadi 23,76 persen pada Maret 2021. Faktor penyebab tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang, diantaranya karena minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya mutu pendidikan. Hal ini juga menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan misi dari Kabupaten Sampang.

Setahun setelah implementasi dari Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* ini berjalan, pada tahun 2019 angka prevalensi di Kabupaten Sampang turun menjadi 34,39% dan menjadi 17,20% pada tahun 2021. Turunnya angka prevalensi *stunting* ini karena berhasilnya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) berjalan dengan baik.

Meskipun terjadi penurunan angka *stunting* di Kabupaten Sampang, faktanya bahwa masih terjadi masalah terkait *stunting* di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Sampang dan target dari Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri untuk penekanan dan penurunan angka *stunting* harus dapat dicapai pada tahun 2024 dibawah 6% yang sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2019-2024.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salli Nur Afifah dengan judul Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; Qotrun Nada, Sahroji, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan dengan judul Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Karawang; Qomariyatus Sholihah,

Ilham Nur Hanifan Maulana, Wike dengan judul Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan *Stunting* di Kabupaten Malang, memiliki persamaan pembahasan yaitu terkait dengan kebijakan *stunting* yang ada di tiap-tiap daerahnya. Namun, terdapat perbedaan yaitu terkait dengan pembahasan yang diberikan pada penelitian sebelumnya hanya secara umum, berbeda dengan yang ingin penulis kaji yaitu lebih dalam lagi terkait dengan program-program yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting* dan program-program lain khususnya oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu mulai dari lokus dan konteks penelitian yang dilakukan khususnya yang ada dalam Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George Edward III. Dimana nantinya penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang lebih optimal lagi.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji terkait dengan implementasi kebijakan *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang, untuk mengetahui dan menganalisa apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting*, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam mensukseskan implementasi Peraturan Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati. Peneliti menyimpulkan bahwa metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif adalah metode yang dapat melihat fenomena yang terjadi dilapangan untuk dapat menganalisis serta menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga sumber data (*person, place, paper*) diatas untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang. Pada penelitian ini juga

penulis menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam menentukan informan untuk mendapatkan data dari wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur menggunakan teori dari George Edward III yang menyatakan bahwa implementasi terdiri dari empat dimensi, yakni komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang didapatkan dan hasil wawancara serta kunjungan peneliti ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dalam Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Sampang, antara lain :

A. Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan dalam Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang yaitu komunikasi yang efektif antara para pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan penurunan *stunting* ini. Agar program penurunan *stunting* dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan, maka seluruh pelaksana kebijakan diharapkan dapat mengerti dan memahami tujuan dan sasaran dari suatu program.

Diperlukannya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah demi memperjelas pembagian tugas dan wewenang, juga antara Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan beberapa dinas lain yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Sampang dan Seluruh Puskesmas serta Posyandu yang ada di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan aspek komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, terdapat tiga hal penting yang mendorong terjadinya komunikasi terkait dengan teori komunikasi Implementasi dari Edward III. Penulis menyimpulkan bahwa dimensi komunikasi yang terdiri dari indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi dari implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang selaku pelaksana utama dari implementasi kebijakan penurunan *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang.

B. Sumber Daya

Selain perlunya komunikasi antar pelaksana kebijakan, dalam menjalankan implementasi dari suatu kebijakan juga diperlukan adanya sumber daya yang dapat membantu dari pelaksanaannya. Sebagaimana menurut Edward III terdapat 4 komponen dalam sumber daya yaitu staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Penulis menyimpulkan fasilitas yang ada dalam menunjang implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk dapat mensukseskan kebijakan ini. Tentunya hal ini karena adanya dukungan langsung dari Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menangani masalah ini.

C. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap program yang dilaksanakan untuk dapat mensukseskan implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cukup baik oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan penurunan *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang. Hal ini agar dalam pelaksanaannya, tidak terjadi hambatan terkait dengan struktur organisasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Selain itu, bahwa adanya standar operasional prosedur yang dibuat oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang melalui proses yang melibatkan pihak lain dengan melihat dari keadaan yang ada di lapangan. Standar operasional prosedur terkait dengan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang sudah dilaksanakan dengan baik dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Dalam implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Sampang sudah dijalankan dengan baik hal ini terbukti dengan data yang ada setiap tahun semakin rendahnya jumlah kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang. Meskipun demikian menurut data terakhir pada Januari 2023, masih tersisa sekitar 7% angka *stunting* yang ada di Kabupaten Sampang.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang

Implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Sampang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Tak sedikit program-program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang

khususnya oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dalam menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Sampang.

Dilihat dari angka prevalensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang, dimana semakin tahun semakin rendah, maka dapat dipastikan ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaannya kebijakan penurunan *stunting* ini, adapun faktor-faktor berikut seperti:

1. Adanya Komitmen dan Kerja Sama dari Berbagai Pihak
2. Adanya Dukungan Anggaran yang Diberikan

Terkait dengan kedua faktor yang menjadi pendukung utama yaitu adanya komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak; dan adanya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang, terbukti dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari banyaknya program-program kegiatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sampang khususnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, pasti terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. terdapat 2 faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang ini, diantaranya:

1. Banyaknya Pernikahan Dini
2. Kurangnya Taat Administrasi bagi Masyarakat Pendatang

Kedua faktor ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di Sampang. Meskipun tidak terlalu menghambat, namun kedua faktor ini bisa menjadi kendala utama bagi Pemerintah Kabupaten Sampang untuk dapat menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Sampang sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Sampang yang memiliki target ditahun 2024 yaitu dibawah dari 6%.

3.3 Upaya yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang untuk Mensukseskan Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang

Menurut data yang penulis peroleh, intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mensukseskan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang antara lain:

1. Pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sampang;
2. Pembentukan dan monitoring evaluasi Tim Pendampingan Keluarga Kabupaten Sampang;
3. Pembentukan Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Sampang;

4. Mini Lokakarya di setiap Kecamatan yang dilaksanakan setiap bulan;
5. Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting*.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwasanya dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan dengan teori Implementasi dari George Edward III, namun di lapangan ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya yaitu adanya pernikahan dini yang sudah menjadi budaya di Madura khususnya dalam hal ini di Kabupaten Sampang sehingga hal ini bisa membuat tingginya kemungkinan balita yang menderita *stunting*. Selain itu juga kurangnya taat administrasi bagi pendatang yang ada di Kabupaten Sampang sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didasarkan pada data *stunting* yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2022 yaitu 6.97%.
2. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang, yaitu:
 - a. Faktor Pendukung
 - Adanya Komitmen dan Kerja Sama dari Berbagai Pihak;
 - Adanya Dukungan Anggaran yang Diberikan.
 - b. Faktor Penghambat
 - Banyaknya Pernikahan Dini;
 - Kurangnya Taat Administrasi bagi Masyarakat Pendatang.
3. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mensukseskan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang dengan adanya beberapa inovasi yang diberikan seperti yang sudah dijelaskan diatas, dengan maksud untuk dapat mengedukasi masyarakat terkait masalah *stunting* dalam rangka pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* ini.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, I. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Erwan Agus Purwanto, Ph.D Dyah Ratih Sulistyastuti, M. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia. *Kementerian Kesehatan RI*, 20.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. *Buana Ilmu*, 2(1). <https://doi.org/10.36805/bi.v2i1.301>
- Kemntrian Kesehatan RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kemntrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Luankali. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: IPDN.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024.
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penurunan *Stunting*.

Sumber Bacaan Internet dan Sumber Lainnya

- Atmasari, A. (2022). *Jangan Anggap Remeh, Berikut ini Ciri-ciri, Penyebab, dan Cara Mencegah Stunting pada Anak*. Diakses pada 6 September 2022. Tersedia di: <https://kehamilansehat.com/id/ciri-ciri-dan-penyebab-stunting-pada-anak/>
- Daerah, D. B. P. (2021). *Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi*. Diakses pada 6 September 2022. Tersedia di: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/3>
- Foundation, P. (2021). *Kesehatan Masyarakat*. Diakses pada 4 September 2022. Tersedia di: <https://penabulufoundation.org/kesehatan-masyarakat/>
- Jatim Newsroom. (2022). *Gubernur Jatim : Penanganan Stunting Harus Dari Masa Remaja*. Diakses pada 4 September 2022. Tersedia di: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-penanganan-stunting-harus-dari-masa-remaja>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Stunting Balita Indonesia Masih di Atas 24% pada 2021*. Diakses pada 3 September 2022. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/08/stunting-balita-indonesia-masih-di-atas-24-pada-2021#:~:text=Berdasarkan hasil Studi Status Gizi,diperkirakan mencapai 26%2C9%25>

Litbangkes, H. (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Diakses pada 3 September 2022. Tersedia di: <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>

